



diskominfo
Kabupaten Bandung

ANALISIS PEMERATAAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANDUNG

DAFTAR ISI

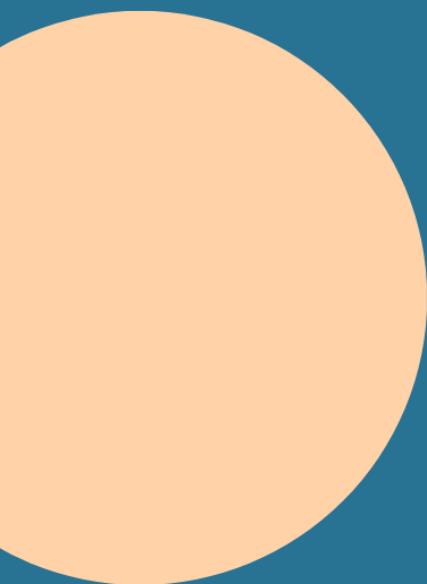
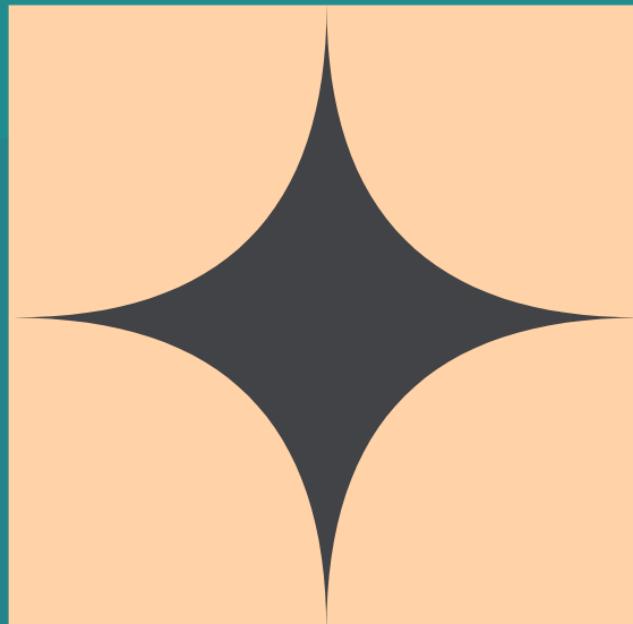
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Batasan Masalah	7
BAB II DATA DAN METODOLOGI	9
2.1. Data.....	10
2.2. Metodologi Analisis	11
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	14
3.1. Pendahuluan	15
3.2. Hasil Analisis.....	15
BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun, Jumlah Peserta Didik SD/MI, dan Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2024	10
Tabel 2. Proporsi Siswa SD/MI per Kecamatan Tahun 2024	17

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pendidikan dasar merupakan hak mendasar bagi setiap anak usia sekolah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan bahwa "*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*", dan Ayat (2) menegaskan bahwa "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*". Mengacu kepada hal tersebut, kelompok sasaran utama yang dimaksud pada jenjang pendidikan dasar adalah anak usia 7–12 tahun. Masa usia ini merupakan periode emas (*golden age*) perkembangan anak, di mana akses terhadap pendidikan yang memadai akan sangat menentukan kualitas keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, diperlukan analisis mengenai pemerataan akses pendidikan dasar untuk memberikan gambaran sejauh mana kebutuhan pendidikan dasar telah terpenuhi di Kabupaten Bandung.



Analisis ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang masih memiliki capaian rendah sehingga dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan pendidikan yang lebih inklusif, adil, berkelanjutan, dan berbasis data.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam analisis ini adalah:

1. Bagaimana kondisi pemerataan akses pendidikan dasar bagi anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Bandung?
2. Kecamatan mana saja di Kabupaten Bandung yang masih memiliki capaian rendah dalam pemerataan pendidikan dasar bagi anak usia 7-12 tahun?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari analisis ini adalah:

1. Mengetahui kondisi pemerataan akses pendidikan dasar bagi anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Bandung.
2. Mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang masih memiliki capaian rendah dalam pemerataan pendidikan dasar bagi anak usia 7-12 tahun.

1.4 Batasan Masalah

Analisis pemerataan akses pendidikan dasar di Kabupaten Bandung dibatasi pada kelompok usia anak sekolah dasar, yaitu 7-12

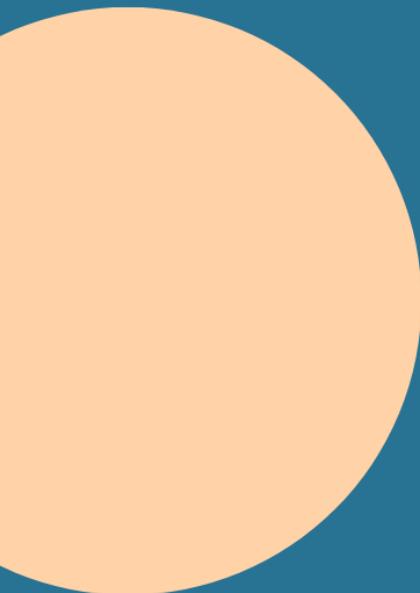
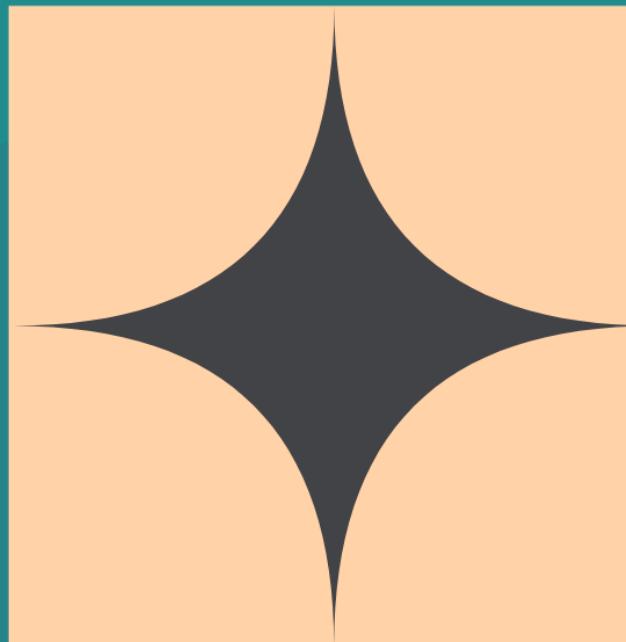


tahun. Selain itu, analisis ini belum menelaah lebih lanjut faktor-faktor penyebab perbedaan capaian pemerataan antar kecamatan di Kabupaten Bandung.

BAB II

DATA DAN

METODOLOGI



2.1. Data

Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder periode 2021–2024 yang diperoleh melalui Portal Satu Data Kabupaten Bandung dengan unggahan berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Data yang digunakan mencakup jumlah anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) per kecamatan, jumlah peserta didik SD/MI per kecamatan, dan jumlah penduduk per kecamatan dengan rincian data disajikan dalam **Tabel 1** sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun, Jumlah Peserta Didik SD/MI, dan Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun (Jiwa)	Jumlah Peserta Didik SD/MI (Jiwa)	Jumlah Penduduk (jiwa)
Arjasari	12.914	13.013	117173
Baleendah	29.979	30.082	277790
Banjaran	14.958	14.019	142033
Bojongsoang	11.116	11.620	112096
Cangkuang	9.253	8.770	86927
Cicalengka	13.946	14.228	131388
Cikancung	12.422	11.678	106420
Cilengkrang	5.532	5.628	55434
Cileunyi	18.800	18.522	182960
Cimaung	9.925	9.543	95383
Cimenyan	11.144	10.750	113143
Ciparay	20.006	19.175	185020

Kecamatan	Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun (Jiwa)	Jumlah Peserta Didik SD/MI (Jiwa)	Jumlah Penduduk (jiwa)
Ciwidey	9.883	9.772	93069
Dayeuhkolot	10.630	11.008	106402
Ibun	10.590	9.807	96415
Katapang	14.582	15.027	138694
Kertasari	8.177	7.752	76136
Kutawaringin	12.353	12.427	112890
Majalaya	18.279	18.273	170250
Margaasih	16.613	15.525	154454
Margahayu	11.590	13.598	121023
Nagreg	6.779	7.192	62712
Pacet	15.657	14.719	130443
Pameungpeuk	10.183	10.083	95615
Pangalengan	18.079	16.637	167958
Paseh	16.428	16.012	146839
Pasirjambu	10.568	9.286	98727
Rancabali	5.648	5.625	54330
Rancaekек	20.070	21.257	191631
Solokanjeruk	9.882	9.348	93155
Soreang	12.605	13.194	123211
Grand Total	408.591	403.570	3.839.721

2.2. Metodologi Analisis

Dalam analisis ini, metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), metode deskriptif kuantitatif merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data berupa angka dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya

tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi. Analisis deskriptif kuantitatif umumnya meliputi penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, grafik, serta perhitungan ukuran pemusatan data seperti *mean*, *median*, *modus*, *standar deviasi*, maupun *persentase*.

Analisis dilakukan dengan membandingkan data tahun 2024 mengenai jumlah siswa SD/mi terhadap jumlah anak usia sekolah dasar (7–12 tahun) di setiap kecamatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Proporsi Siswa SD/MI } (\%)_i = \frac{\text{Jumlah Siswa SD/MI}_i}{\text{Jumlah Anak Usia 7 – 12 Tahun}_i} \times 100\%$$

dengan i merupakan kecamatan ke- i (misalnya Dayeuhkolot, Rancabali, Pangalengan, dan seterusnya). Perbandingan ini memungkinkan identifikasi kecamatan dengan proporsi anak usia sekolah tinggi dan rendah, sekaligus menilai seberapa banyak anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang telah mengakses pendidikan dasar. Dengan demikian, dapat terlihat mana kecamatan yang memiliki rasio siswa lebih tinggi ataupun lebih rendah dibanding jumlah anak usia sekolah sehingga dapat dijadikan dasar dalam

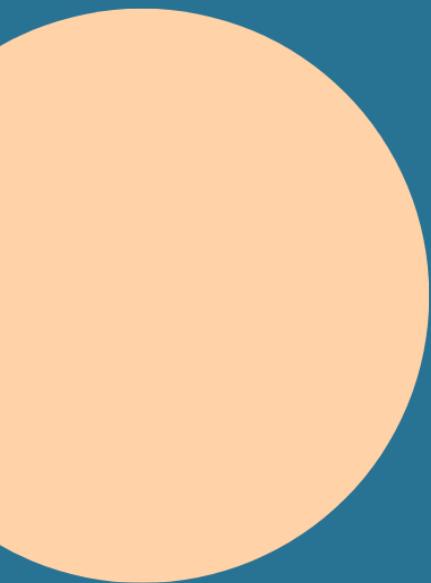
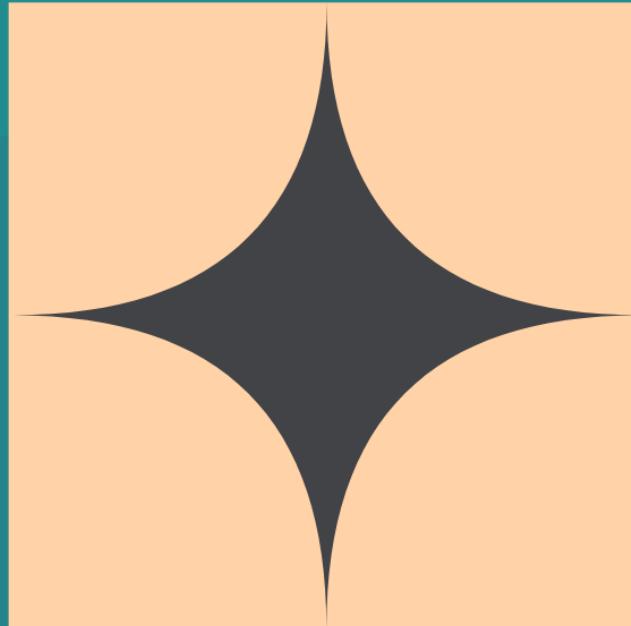
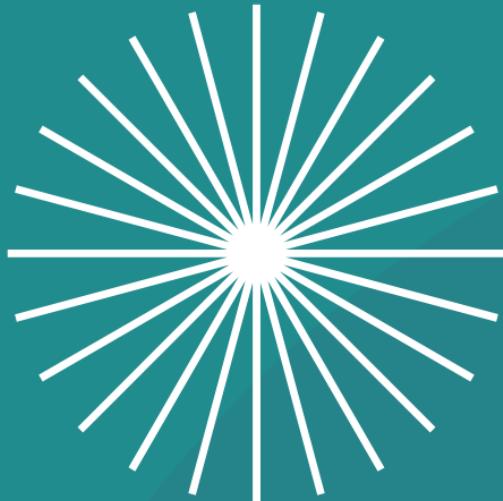


merumuskan strategi pemerataan akses pendidikan dasar di
Kabupaten Bandung.

BAB III

HASIL DAN

PEMBAHASAN



3.1. Pendahuluan

Bagian ini menyajikan hasil analisis terhadap data yang tersedia guna menggambarkan kondisi pemerataan akses pendidikan dasar di Kabupaten Bandung tahun 2024. Analisis dilakukan dengan metode yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan penyajian hasil dilakukan dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran yang komprehensif.

3.2. Hasil Analisis

Jumlah anak usia 7–12 tahun di Kabupaten Bandung pada periode 2021–2024 relatif stabil dengan rata-rata sekitar 400 ribu anak setiap tahunnya. Jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebanyak 412.075 anak, kemudian jumlahnya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2024 menurun menjadi 408.591 anak pada tahun 2024. Dari jumlah 408.591 anak di tahun 2024, sebaran tertinggi berada di Kecamatan Baleendah (29.979 anak), Rancaekek (20.070 anak), dan Ciparay (20.006 anak). Jika ditinjau lebih mendalam pada tingkat kecamatan, hampir seluruh wilayah memiliki proporsi anak usia 7–12 tahun sekitar 10–12% dari total penduduk. Kecamatan dengan proporsi tertinggi adalah Pacet (12,26%), Cikancung (11,92%),

dan Paseh (11,41%). Temuan ini mengindikasikan bahwa kebutuhan fasilitas pendidikan dasar tersebar cukup merata di seluruh wilayah, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Namun demikian, pemerataan jumlah anak usia sekolah perlu dibandingkan dengan jumlah siswa yang benar-benar terdaftar di jenjang SD/MI. Pada periode 2021–2024, jumlah siswa SD/MI selalu berada di atas 398 ribu, dengan capaian tertinggi 403.570 siswa pada 2024. Jika dibandingkan dengan jumlah anak usia sekolah, proporsi partisipasi sekolah selalu tinggi, yakni antara 96,79% hingga 98,77%. Hal ini mengindikasikan bahwa akses ke pendidikan dasar di Kabupaten Bandung sudah sangat baik dengan hanya sekitar 1–3% anak yang belum terakomodasi setiap tahunnya.

Lebih lanjut, analisis per kecamatan menunjukkan variasi capaian. Proporsi siswa SD/MI terhadap jumlah anak usia sekolah dasar berkisar antara 92% hingga 106% dengan rincian terlampir pada

Tabel 2.

Tabel 2. Proporsi Siswa SD/MI per Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Rasio	Kecamatan	Rasio
Nagreg	106,09	Cicalengka	97,57
Rancaekek	105,91	Paseh	96,38
Margahayu	105,29	Cimaung	96,15
Arjasari	104,75	Katapang	95,97
Soreang	104,67	Ciwidey	95,96
Bojongsoang	104,27	Ciparay	95,84
Rancabali	101,68	Pameungpeuk	95,21
Cimenyan	101,12	Kertasari	94,80
Cikancung	100,75	Cangkuang	94,78
Kutawaringin	100,59	Solokanjeruk	94,58
Banjaran	100,52	Margaasih	94,50
Baleendah	100,34	Pasirjambu	93,96
Majalaya	99,96	Ibun	92,79
Cilengkrang	99,64	Pangalengan	92,02
Dayeuhkolot	99,02		
Cileunyi	98,52		
Pacet	98,40		

Berdasarkan **Tabel 2**, terlihat bahwasanya terdapat 12 kecamatan yang tercatat memiliki proporsi lebih dari 100%, di antaranya adalah Nagreg (106,09%), Rancaekek (105,91%), dan

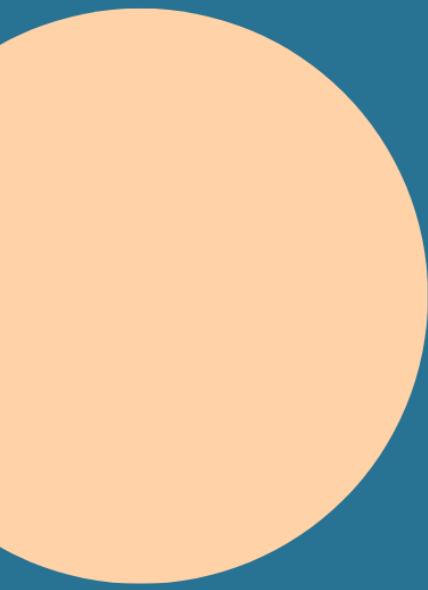
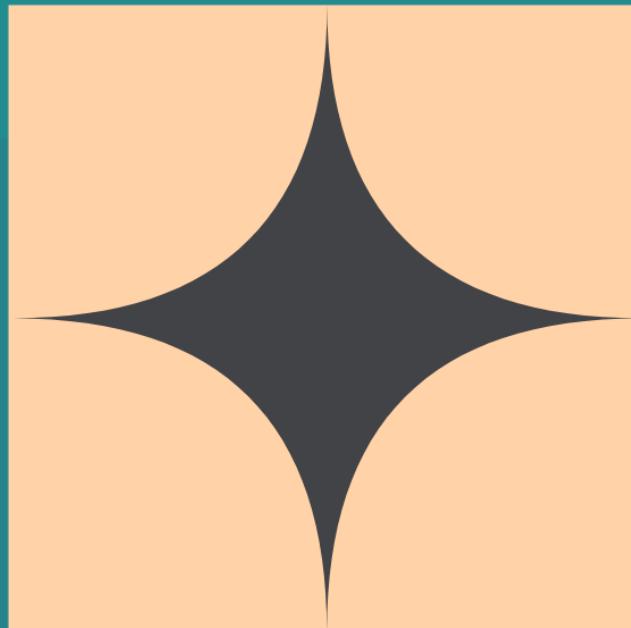


Margahayu (105,29%). Sebaliknya, masih terdapat 7 kecamatan dengan proporsi di bawah 95%, di antaranya adalah Pangalengan (92,02%), Ibun (92,79%), dan Pasirjambu (93,9%).

BAB IV

SIMPULAN DAN

REKOMENDASI



Secara umum, akses pendidikan dasar di Kabupaten Bandung sudah sangat tinggi dengan 98,77% anak usia 7–12 tahun sudah mengenyam bangku pendidikan dasar. Namun, adanya variasi per kecamatan perlu dicermati lebih lanjut. Beberapa kecamatan menunjukkan proporsi lebih dari 100% yang dapat mengindikasikan adanya penyerapan peserta didik dari luar wilayah. Sebaliknya, terdapat kecamatan dengan capaian relatif rendah (<95%) yang perlu mendapat perhatian khusus agar tidak semakin tertinggal dibanding wilayah lain. Analisis ini belum menelaah faktor-faktor tersebut secara rinci sehingga hal ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk memahami penyebab kesenjangan pemerataan antar kecamatan.